



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

NOTULEN RAPAT

Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020

Topik: Peningkatan Transparansi terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pelaksanaan

Hari/ Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018

Waktu : 09.00-12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat 204

2. Pimpinan Rapat : Tenaga Ahli Madya, Deputi II, Kantor Staf Presiden

3. Peserta Rapat :

1. Sub Bagian Perencanaan, LKPP
2. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, LKPP
3. Direktorat Pelaksanaan Kebijakan Umum, LKPP
4. Staf Perencanaan, Komisi Informasi Pusat
5. Biro Perencanaan dan Keuangan, Komisi Pencegahan Korupsi
6. *Transparency International Indonesia* (TII)
7. Sekretariat Open Government Indonesia

4. Pembahasan Rapat

1. Pertemuan bilateral hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.
2. Rencana aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L.
3. Tujuan dari renaksi ini adalah untuk membuka data dan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
4. Perkembangan mekanisme keterbukaan data di LKPP:
 - a. LKPP sudah membuka informasi publik melalui SPSE dan SIRUP. SPSE ruang lingkupnya mulai perencanaan-hingga pengumuman. Dokumen tender sudah full elektronik tanpa perlu dicetak. Untuk dokumen kontrak, masih terdapat masalah pada proses tandatangan yang masih

- membutuhkan cap basah. Pembuktian tandatangan elektronik mekanismenya berbeda dan di Indonesia belum diakui tandatangan elektronik untuk dokumen kontrak
- b. Terkait dengan blacklist penyedia jasa, LKPP akan mengembangkan fraud vendor melalui system SIKAP. Data SIKAP sudah ada data BO tetapi masih *selfdeclare* dan belum dibuktikan. SIKAP disambungkan pada sisminbakum untuk PT. alat verifikasi sikap. peraturan LKPP no.17/2018 tentang sanksi daftar hitam.
 - c. LKPP belum memahami terkait penggunaan OCDS dalam mendorong instansi untuk melakukan publikasi secara bertahap, sepanjang mekanisme pengadaan. Namun, LKPP sudah melakukan publikasi resume kontraknya penyedia barang dan jasa
5. Untuk mempublikasikan dokumen kontrak, harus berkonsultasi dengan PPK apakah siap untuk dipublikasikan. Kalau pada lingkup LKPP sendiri sudah memiliki daftar informasi publik (DIP) yang menjadi acuan publik untuk dapat meminta dokumen-dokumen pengadaan. Namun, memang dokumen tersebut hanya dalam ruang lingkup LKPP dan bisa didapatkan melalui permintaan tertulis.
 6. KIP sendiri dapat memfasilitasi untuk mendorong transparansi kontrak pengadaan, namun dokumen tersebut harus diajukan dalam sidang dan harus dapat diaplikasikan kepada seluruh stakeholder KIP. Proses penerbitan PerKI ini juga akan diawali dengan konsultasi publik, apakah data tersebut merupakan sebuah kebutuhan dari masyarakat. Jika informasi yang didapat dalam konsultasi sudah cukup sebagai argumentasi, maka dapat dilakukan perumusan peraturan.
 7. Terkait dengan transparansi proses pengadaan juga terdapat dalam stranas PK. Namun, dalam stranas lebih kepada penguatan kelembagaan dan manajemen SDM.
 8. Tindaklanjut hasil pertemuan, perlu dilakukan kroscek informasi dan progress Kemenkumham dan stranas PK terkait dengan integrasi blacklist BO. Selain itu, harapannya dalam membuat renaksi OGI baiknya terintegrasi dengan stranas agar menjadi laporan yang terintegrasi.

Notula Rapat
Tities Eka A.

Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi

Aksi : Peningkatan Transparansi terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Latar Belakang :

Sulitnya mengakses dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa kerap menjadi keluhan masyarakat. Sebagai penyedia jasa masyarakat tentu berhak mengetahui informasi terkait dengan kinerja penyedia jasa dan mekanisme lelang. Untuk mendapatkan informasi tersebut, dibutuhkan publikasi dokumen tahapan pengadaan yang dapat diakses oleh publik.

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Peningkatan Transparansi terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Terpublikasikannya seluruh dokumen pengadaan dalam bentuk data terbuka	1. Tersedianya <i>update</i> SK LKPP terkait Daftar Informasi Publik untuk dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Komisi Pemberantasan Korupsi
		2. Tersedianya rekomendasi implementasi SK DIP Barang dan jasa pemerintah 3. Training pengawasan pengelolaan barang dan jasa kepada organisasi masyarakat sipil baik di pusat maupun daerah 4. Terlaksananya konsultasi publik terkait dengan pengaturan DIP PBJ di pemerintah pusat 5. Terbitnya Perki Terkait dengan DIP PBJ di pemerintah pusat	Komisi Informasi Pusat	